

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam menjalankan roda pemerintah daerah perlu penerapan prinsip-prinsip *good governance* untuk perbaikan kinerja pemerintah daerah. Penyelenggaraan pemerintah daerah dipengaruhi oleh pandangan pemerintah dari otonomi terpusat ke otonomi daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Konsekuensinya bagi daerah untuk mempertanggungjawabkan alokasi dana dimiliki secara efisien dan efektif. Implikasinya terhadap pertumbuhan daerah yang berjalan sesuai harapan. Perbaikan dalam tata kelola pemerintahan dilakukan seiring terus berkembangnya babak baru tata kelola pemerintahan.

Kinerja dapat diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan. Kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah (Hastoro, 2016).

Dengan otonomi terdapat dua aspek kinerja keuangan yang dituntut agar lebih baik dibanding dengan sebelum otonomi daerah Mardiasmo (2016). Aspek pertama adalah bahwa daerah diberi kewenangan mengurus pembiayaan daerah dengan kekuatan utama pada kemampuan pendapatan asli daerah. Kehadiran UU nomor 34 tahun 2000 tentang Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah serta peraturan pelaksanaannya adalah momentum dimulainya pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah secara penuh (desentralisasi fiskal). Aspek kedua yaitu disisi manajemen pengeluaran daerah, sesuai azas otonomi daerah bahwa

pengelolaan keuangan daerah harus lebih akuntabel dan transparan tentunya menuntut daerah agar lebih efisien dan efektif dalam pengeluaran daerah.

Berdasarkan peranan Bupati Semarang, akan mencoba mengevaluasi serta memperbaiki seluruh kinerja di pemerintahan Kabupaten Semarang yang hingga saat ini belum baik atau belum optimal. Terdapat temuan kelebihan pembayaran pada kegiatan belanja modal di beberapa OPD Kabupaten Semarang. Adanya kerja sama antara dinas dengan perusahaan juga tidak sesuai ketentuan. Namun, yang menjadi sorotan ternyata sejauh ini eksekutif belum mampu menjalankan fungsinya sesuai undang-undang. Karena itu, BPK menilai masih ada sebagian kinerjanya yang belum patuh terhadap perundang-undangan. Apabila mengklaim sudah patuh, tidaklah mungkin BPK menemukan hal tersebut di sepanjang Tahun Anggaran 2017. Evaluasi akan terus dilakukan untuk tercapainya pelaksanaan pembangunan Kabupaten Semarang yang lebih baik lagi. Termasuk juga berkaitan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017 (sumber : TribunJateng.com).

Kinerja anggaran sejak tahap penyusunan, pembahasan hingga pengesahan APBD dan laporan keterangan atas pertanggung jawaban, difokuskan pada besaran biaya yang dianggarkan yaitu jumlah anggaran yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Terserapnya anggaran diutamakan dibanding menghemat anggaran yang nantinya menyebabkan penggunaan anggaran untuk hal-hal yang tidak perlu bahkan melenceng dari target kinerja pemerintah. Pengukuran kinerja pemerintah juga menjadi bagian yang sangat penting dalam upaya mewujudkan akuntabilitas kinerja pemerintah. Pengukuran kinerja memiliki

dua tujuan utama yaitu untuk mengukur tingkat akuntabilitas internal dan akuntabilitas eksternal. Pengukuran kinerja yang baik dan handal merupakan salah satu faktor utama suksesnya sebuah organisasi.

Akuntabilitas kinerja instansi juga merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi dalam upaya pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Akuntabilitas juga sebagai gambaran bagaimana penggunaan dana yang berasal dari masyarakat dan selain itu menunjukkan bagaimana dana tersebut digunakan secara ekonomis, efisien dan tepat sasaran.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wirmie (2018) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan oleh Jitmau, Kalangi & Lambey (2016) menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah karena pemerintah gagal dalam menjalankan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya secara periodik.

Transparansi sebagai perwujudan amanat peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan pemerintah telah memberikan tekanan kepada aparatur pengelola untuk membuka diri terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi seluas-luasnya dengan benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah daerah.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh sastra, yuniarta & surya (2015) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja pemerintah daerah, ini konsisten dengan hasil penelitian jitmau, kalangi, & lambey(2016) yang menyatakan transparansi berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja pemerintah.

Sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan APBD. Sistem akuntansi keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah serta memudahkan pengendalian yang efektif atas seluruh aset, hutang, dan ekuitas dana(Syaifudin, 2017).

Hal ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Harimurti (2017)menyatakan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Sistem akuntansi keuangan daerah yang memadai tersebut tidak hanya dapat memverifikasi transaksi-transaksi agar dapat ditelusuri dana-dana sesuai dengan tujuannya, serta mengecek otoritas, efisiensi, dan keabsahan pembelajaran dana, tetapi sistem tersebut juga dapat mendukung pada pencapaian kinerja. Penelitian dari Rahmad Hidayat(2015) juga menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah juga berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Daerah kota Padang.

Pengawasan internal meliputi suatu kegiatan pengawasan baik administrasi maupun pengelolaan keuangan oleh pihak interes

perusahaan. Pengawasan ini bertujuan untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan pelaksanaan tugas – tugas organisasi (Almanda Primadona, 2013).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pengawasan Internal adalah seluruh proses kegiatan audit, *review*, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada menteri/pimpinan lembaga.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Harimurti (2017) menunjukkan hasil yang signifikan antara pengawasan internal dan kinerja pemerintah daerah. Almanda Primadona (2013) dalam penelitiannya juga mengungkapkan bahwa pengawasan internal berpengaruh signifikan dalam kepuasan kinerja pemerintahan kota Bandung. Akan tetapi, berbeda dengan penelitian yang dilakukan Laksana & Handayani (2014) menyatakan Pengawasan Internal tidak berpengaruh signifikan dan searah/positif terhadap kinerja pemerintah daerah pada Pemerintah Kabupaten Batang. Pengawasan internal memonitor semua program dan kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten

Batang pada semua tingkatan. Pengawasan internal dituntut untuk lebih giat lagi melakukan koreksi atas penyimpangan dari kinerja yang diinginkan.

Dengan adanya partisipasi penyusunan anggaran, maka kinerja pegawai akan meningkat. Partisipasi penyusunan anggaran menyebabkan atasan dan bawahan akan berkomitmen dalam organisasi karena adanya tanggung jawab yang timbul dimana anggaran merupakan hasil diskusi kedua belah pihak. Partisipasi penyusunan anggaran membuat atasan akan mengetahui informasi dari bawahan terkait pada pekerjaan (Wicaksono, 2016).

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Intihanah & afifa(2016) menyebutkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah berpengaruh positif. Sedangkan penelitia Syaifudin(2017) menyatakan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah, dikarenakan penatausahaan dan pencatatan aset tetap pemerintah daerah belum sepenuhnya tertib, serta belanja hibah belum dilengkapi bukti pertanggungjawaban oleh penerima hibah.

Berdasarkan uraian diatas mengingat pentingnya kinerja keuangan pemerintah daerah bagi OPD, maka penulis mengambil judul “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pengawasan Internal, dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang”.

1.2. Rumusan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan pada penelitian ini, peneliti akan memberikan batasan agar tidak menyimpang serta dapat diketahui sejauh mana

hasil penelitian dapat dimanfaatkan. Masalah dalam penelitian ini adalah akuntabilitas, transparansi, sistem akuntansi keuangan daerah, pengawasan internal, dan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Semarang.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Semarang?
2. Apakah transparansi berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Semarang?
3. Apakah sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Semarang?
4. Apakah pengawasan internal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Semarang?
5. Apakah partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Semarang.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dalam penelitian ini terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai, tujuan tersebut yaitu :

1. Untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Semarang.
2. Untuk menganalisis pengaruh transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Semarang.

3. Untuk menganalisis pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Semarang.
4. Untuk menganalisis pengaruh pengawasan internal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Semarang.
5. Untuk menganalisis pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Semarang

1.4. Manfaat Penelitian

Dari tujuan di atas manfaat yang dapat diperoleh yaitu :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai wawasan dan referensi teori yang diperoleh dalam mengembangkan ilmu akuntansi keuangan daerah.
 - b. Sebagai referensi bagi para peneliti di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk penelitian selanjutnya dan menambah ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi, khususnya tentang kinerja pemerintah daerah.

- b. Bagi Akademis

Dapat dijadikan referensi serta wacana tentang kinerja pemerintah daerah kabupaten boyolali dan dapat dijadikan referensi pada peneliti selanjutnya.